



**LAPORAN PENGAWASAN
CAPAIAN KOMPETENSI ASN
TAHUN 2025**



TRIWULAN II



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN**
Jalan Semila Jati II Dusun Tonja, Desa Gubug, Kabupaten Tabanan
2025


KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Laporan Pemantauan Disiplin ASN Triwulan II 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyajian laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengautan kualitas SDM aparatur.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga kinerja aparatur terus dapat ditingkatkan dalam mendukung pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Tabanan.

Untuk peningkatan kualitas laporan ini, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tabanan, 1 Juli 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 2

 1.3 Tujuan 3

 1.4 Metodologi 3

BAB II KELEMBAGAAN..... 4

 2.1 Struktur Organisasi 4

 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi..... 4

 2.3 Sumber Daya Aparatur 5

 2.4 Rencana Aksi 6

BAB III PENGAWASAN KOMPETENSI ASN..... 7

 3.1 Evaluasi Presensi Online 7

 3.2 Evaluasi Kompetensi ASN 8

 3.3 Kendala dan Rencana Tindak Lanjut..... 8

BAB IV PENUTUP 10

 4.1 Kesimpulan 10

 4.2 Saran 10

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pemerintah menaruh perhatian besar pada disiplin ASN. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya). Jadi, bila disimpulkan secara umum, disiplin merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada sesuatu peraturan yang telah dibuat. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pendisiplinan merupakan usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun instrumen hukuman dimana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai. Disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisiplin yang akan membuat para pegawai mendapat kemudahan dalam bekerja, dengan begitu akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha pencapaian tujuan.

Pemerintah berkewajiban membentuk sistem birokrasi mulai dari pemerintahan yang paling tinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah. Diharapkan pelayanan administrasi kepegawaian dapat meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam mendukung kinerjanya.

Aparatur yang sudah disiplin harus didukung oleh kualitas SDM yang ditunjukkan dalam kompetensi yang dimilikinya sehingga pelayanan administrasi dan pelayanan kebencanaan akan lebih optimal. Sesuai amanah Peraturan Menteri PAN RB Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara pada Pasal 5 menyatakan Standar Kompetensi ASN terdiri atas : a). Standar Kompetensi Jabatan Tinggi, b). Standar Kompetensi Jabatan Administrator, dan c). Standar Kompetensi Jabatan Fungsional.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu unit pelayanan maka dituntut komitmen dan dedikasi pegawai negeri sipil yang didasari oleh disiplin dan kompetensi yang kuat dalam pelayanan. Selama ini sudah banyak inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan kinerja pegawai negeri sipil agar meningkat disiplin dan kompetensinya. Namun belum semua aparatur ASN displinya 100% dan kompetensi belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi tugas yang diemban. Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara terus menerus berkoordinasi dengan BKPSDM dalam tata kelola kepegawaian. Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan IPM aparatur maka dilakukan evaluasi atas disiplin dan kompetensi pegawai secara berjenjang dan berkala sesuai administrasi kepegawaian.

1.2 Landasan Hukum.

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara.
6. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
7. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan

1.3. Tujuan.

1. Memberikan informasi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Memberikan informasi hasil pemantauan (pengawasan melekat) disiplin pegawai negeri sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
3. Memberikan informasi hasil pemantauan capaian kompetensi ASN melalui kegiatan diklat, pelatihan, bimtek, seminar, workshop, dan lainnya.
4. Menyajikan rencana aksi atas hasil pemantauan disiplin pegawai kedepannya.

II. KELEMBAGAAN

2.1 Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah disahkan sebagai unit layanan kebencanaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011. Kelembagaan ini memiliki struktur :

- Kepala BPBD dijabat exoficio oleh Sekretaris Daerah Kab. Tabanan
- Kepala Pelaksana BPBD dijabat oleh Eselon III a
- Kepala Sekretariat dijabat oleh Eselon IVa
- Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dijabat oleh Eselon IVa
- Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dijabat oleh Eselon IVa
- Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi dijabat oleh Eselon IVa
- Pelaksana yang dijabat oleh Fungsional Umum Golongan II – III.

Komitmen pemerintah daerah dalam pelayanan urusan wajib dasar sub urusan bencana seperti yang diamanhka dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 maka ditingkatkan status kelembagaannya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022. Susunan organisasi sesuai lebih lanjut dijabarkan dalam dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2022, pada Pasal 2 bahwa BPBD terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu : Kepala Badan, unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Kelembagaan ini memiliki struktur :

- Kepala BPBD dijabat exoficio oleh Sekretaris Daerah Kab. Tabanan
- Kepala Pelaksana BPBD dijabat oleh Eselon IIb
- Sekretaris dijabat oleh Eselon IIIb
- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dijabat oleh Eselon IIIb
- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dijabat oleh Eselon IIIb
- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dijabat oleh Eselon IIIb
- Kasubag Umum dan Keuangan dijabat oleh Eselon IVa
- Pelaksana yang dijabat oleh Fungsional Umum Golongan III.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh kepala daerah mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.3 Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan urusan wajib dasar di sub urusan kebencanaan didukung oleh sumber daya aparatur pegawai negeri sipil berikut ini.

| No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan |
|----|--|--------------------|---------------------|----------|
| A | PNS | | | |
| 1 | I Nyoman Srinadha Giri, SE,MM | 197406242006041010 | Pembina Tk. I | IV/b |
| 2 | Agung Raka Bhakta Wirawan, S.Pi,MMA | 197606082002121009 | Pembina | IV/a |
| 3 | Dewa Gede Antakesuma, SH | 197512032002121007 | Pembina | IV/a |
| 5 | I Gede Dharmayasa, SE | 197003291999031005 | Pembina | IV/a |
| 5 | I Putu Purnawan SE, M.Si | 198612252011011013 | Penata Tk.I | III/d |
| 6 | I Putu Suryawan, SE | 197509212002121007 | Penata Tk.I | III/d |
| 7 | Ni Nyoman Sukriastini, S.Sos | 197710152007012017 | Penata Tk.I | III/d |
| 8 | Meithy Elizabeth Sundah, SE | 197105232006042005 | Penata Tk.I | III/d |
| 9 | I Ketut Suadnyana, SH | 197205292007011014 | Penata | III/c |
| 10 | I Ketut Agus Saputra, SH | 197208052002121008 | Penata | III/c |
| 11 | Ni Made Suasti, SE | 196712312008012070 | Penata Muda Tk.I | III/b |
| 12 | Ni Ketut Buda, SH | 196909112007012022 | Penata Muda Tk.I | III/b |
| 13 | I Kade Astawa | 196906142008011020 | Penata Muda | III/a |

Periode pelaporan 31 Maret 2025 sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana belum ada P3K. Non ASN yang bertugas di administrasi seperti berikut ini.

| No | Nama | Pendidikan | Penugasan |
|----|--------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Ni Kadek Ayu Ariati | SMK | Sekretariat |
| 2 | Ni Made Sri Wiantari, SH | S.1 (Ilmu Hukum) | Sekretariat |

| | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 3 | Ni Ketut Wardaningsih, S.Sos | S.1 (Ilmu Administrasi Negara) | Bid KL |
| 4 | Ni Kadek Rani Puspita Sari, SP | S.1 (Agroteknologi) | Sekretariat |
| 5 | Ni Wayan Lioni Artini, SH | S.1 (Ilmu Hukum) | Sekretariat |
| 6 | Ni Luh Putu Ardani Sintya Dewi, SH | S.1 (Ilmu Hukum) | Sekretariat |
| 7 | Ni Made Lisa Santini | SMA | Sekretariat |
| 8 | Ni Made Sudiartini | SMK | Bid KL |
| 9 | I Nyoman Adnyana Putra | SMA | Bid RR |
| 10 | I Komang Erwin Sanjaya | SMK | Sekretariat |
| 11 | I Wayan Sumerdana | SMA | Bid PK |
| 12 | I Made Ariadi, SE | S.1 (Ekonomi Pembangunan) | Bid PK |

Pelayanan publik kebencanaan didukung oleh sumber daya manusia yang saat ini adalah Non ASN yaitu Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari 37,14% sudah sarjana (DII-S1) dan 62,86% sudah SMA/SMK/SMIP. Datanya seperti berikut ini.

| No | Nama | Pendidikan | Penugasan |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | I Wayan Tuartawan,SE | S1 (Ekonomi Manajamen) | TRC |
| 2 | I Kadek Krisna Dwipayana, SE | S1 (Ekonomi Manajamen) | TRC |
| 3 | Gusti Putu Gede Dwijaya | SMA | TRC |
| 4 | I Made Putra Hariawan, SE | S.1 (Ekonomi Pembangunan) | TRC |
| 5 | I Gede Agus Sanjaya | DI Pariwisata | TRC |
| 6 | I Wayan Darma Sudana | SMA | TRC |
| 7 | I Wayan Arwikayasa | SMK | TRC |
| 8 | I Putu Wisnu Putera Setiawan | SMA | TRC |
| 9 | I Made Adi Sucitrayana | SMK | TRC |
| 10 | I Gede Rumindra , S.Kom | S1 (Informatika dan Teknik Komputer) | TRC |
| 11 | I Nyoman Tri Harta Jaya | SMA | TRC |
| 12 | I Made Agus Wirawan | SMA | TRC |
| 13 | I Made Wiana | SMA | TRC |
| 14 | I Nyoman Adi Kusumayasa | SMA | TRC |
| 15 | I Kadek Dwindra Anjasmara | SMA | TRC |
| 16 | I Gede Putu Arya Bayu Pratama | SMA | TRC |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|-----|
| 17 | I Made Kurniarta | SMIP | TRC |
| 18 | I Wayan Arya Suteja, A.Md | DIII | TRC |
| 19 | I Gusti Agung Gede Saputrayana,S.S | S1 (Sastra Inggris) | TRC |
| 20 | I Made Sasnata | SMA | TRC |
| 21 | I Gusti Wayan Sumerbawa | SMA | TRC |
| 22 | Ida Bagus Gede Sudarta, SE | S1 (Ekonomi Pembangunan) | TRC |
| 23 | I Putu Liong Aditya | SMK | TRC |
| 24 | I Wayan Agus Wiranata, S.Pd | S1 (Pendidikan Biologi) + Akta IV | TRC |
| 25 | I Gede Putu Agus Indra Wiguna | SMK | TRC |
| 26 | I Made Hendra Adi Guna | SMA | TRC |
| 27 | I Putu Mahardyana, S.Pd | S1 (Pendidikan Olahraga dan Kesehatan + Akta IV) | TRC |
| 28 | I Made Putra Udiana, S.Pd | S1 (Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi) | TRC |
| 29 | I Putu Bayu Adi Pratama, SE | S1 (Ekonomi Pembangunan) | TRC |
| 30 | I Gde Putu Ananta Jala Palguna | SMA | TRC |
| 31 | I Gusti Nyoman Agung Perayoga | SMA | TRC |
| 32 | I Made Wikanta Yasa | SMA | TRC |
| 33 | I Made Wirayana | SMA | TRC |
| 34 | Ida Bagus Nyoman Surya Atmaja | SMA | TRC |
| 35 | I Nengah Adi Arsana | DIII (Manajemen) | TRC |

Sumber : Data Pegawai, 2024

2.4 Rencana Aksi Pengawasan

- Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama pejabat truktural sudah merumuskan rencana aksi pengawasan kinerja kompetensi ASN melalui :
- Pengawasan disiplin secara berjenjang.
 - Rapat internal bulanan dalam mengevaluasi capaian kompetensi ASN dalam mengikuti kegiatan diklat, pelatihan, bimtek, seinar, workshop, dan lainnya.
 - Pelaporan capaian kompetensi ASN di aplikasi Satkerthi Tabanan.

III. PENGAWASAN KOMPETENSI ASN

3.1 Pengawasan Presensi Online

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pemantauan disiplin pegawai periode Janauri sd Juni 2025 dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Pemantauan waskat (pengawasan melakat) yang dilakukan secara berjenjang sehingga tanggungjawab secara berjenjang dapat dijadikan motivasi oleh semua pegawai untuk memenuhi estándar kedisiplinan.
- b. Pemantauan secara elektronik melalui presensi olnine yang servernya terpusat di BKPSDM Kabupaten Tabanan. Pegawai setiap pagi harus *scan in* dan setiap sore (pulang kerja) harus *scan out* dan hasilnya dapat dilihat di riwayat scan. Melalui absesni on line ini pegawai harus mampu mengkoordinasikan waktu kerja dan jam kerja dengan baik. Adapun rekapitulasi absesnsi online PNS seperti berikut ini.

| Bulan | Tingkat kehadiran | Tingkat ketidakhadiran | Keterangan |
|-----------|-------------------|------------------------|---|
| I | 99,26 | 0,74 | Terlambat 3 orang, 2 pulang sebelum waktu orang |
| II | 99,50 | 0,50 | Terlambat 2 orang, pulang sebelum waktu 2 orang |
| III | 99,58 | 0,42 | Terlambat 2 orang, 2 pulang sebelum waktu orang |
| IV | 99,96 | 0,04 | Terlambat 1 orang, 0 pulang sebelum waktu 0 orang |
| V | 99,58 | 0,42 | Terlambat 2 orang, 2 pulang sebelum waktu orang |
| VI | 99,42 | 0,48 | Terlamba 2 orang, 0 pulang sebelum waktu orang |
| Rata-rata | 99,47 | 0,53 | |

- c. Sekretaris ditugaskan dalam pemantauan penugasan, cuti, sakit dimana verifikasi secara berjenjang dan selalu dihimbau agar selama penugasan, cuti, dan atau sakit distribusi pekerjaan dapat terbagi habis sehingga pelayanan tetap berjalan.
- d. Rekapitulasi absensi online setiap bulan oleh Funsgional Umum yang ditugaskan sebagai admin absensi online dengan koordinasi admin BKPSDM. Adapun hasil evalausinya sebagai berikut :
 - Tingkat kehadiran periode Triwulan I dengan kehadiran rata-rata 99,45%, dimana bulan Januari rata –rata 99,26%, bulan Pebruari rata-rata 99,50%, dan bulan Maret rata-rata 99,58% atau mengalami peningkatan / penurunan kedisiplinan setiap bulannya.

- Tingkat kehadiran periode Triwulan II dengan kehadiran rata-rata 99,48%, dimana bulan April rata –rata 99,96 %, bulan Mei rata-rata 95,58%, dan bulan Juni rata-rata 99,42% atau mengalami peningkatan / penurunan kedisiplinan setiap bulannya
- Belum semua pegawai dapat hadir 100% setiap bulanya karena adanya pegawai yang cuti, sakit, pulang mendahului, dan terlambat absen. Semua sudah dikoordiansikan dengan pegawai berangkutan dan BKPSDM karena terkait juga dengan SIMKITA Online yang berdampak pada tambahan tunjangan penghasilan pegawai

3.2 Pengawasan Kompetensi ASN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengawasan kompetensi pegawai periode Janauri sd Maret 2025 dilakukan dengan beberapa cara :

- a) Himbauan secara berjenjang dari Kepala Pelaksana ke Eselon III agar bawahannya secara proaktif meningkatkan kompetensi mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi tatap muka maupun daring yang diseleggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b) Admin Satkerthi Tabanan di BPBD melaporkan keaktifan ASN menginput capaian kompetensi sesuai akun masing-masing pegawai sehingga terpantau oleh BLKPSDM. Adapun hasil pengawasan PNS seperti berikut ini.

| No | Nama | NIP | Capaian Kompetensi | % dari target 20JP |
|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | I Nyoman Srinadha Giri, SE,MM | 197406242006041010 | 27 JP | 135 |
| 2 | Agung Raka Bhakta Wirawan, S.Pi,MMA | 197606082002121009 | 51 JP | 225 |
| 3 | Dewa Gede Antakesuma, SH | 197512032002121007 | 27 JP | 135 |
| 5 | I Gede Dharmayasa, SE | 197003291999031005 | 35 JP | 175 |
| 5 | I Putu Purnawan SE, M.Si | 198612252011011013 | 3 JP | 15 |
| 6 | I Putu Suryawan, SE | 197509212002121007 | 40 JP | 200 |
| 7 | Ni Nyoman Sukriastini, S.Sos | 197710152007012017 | 38 JP | 190 |
| 8 | Meithy Elizabeth Sundah, SE | 197105232006042005 | 18 JP | 90 |
| 9 | I Ketut Suadnyana, SH | 197205292007011014 | 54 JP | 270 |
| 10 | I Ketut Agus Saputra, SH | 197208052002121008 | 27 JP | 135 |
| 11 | Ni Made Suasti, SE | 196712312008012070 | 12 JP | 60 |
| 12 | Ni Ketut Buda, SH | 196909112007012022 | 24 JP | 120 |
| 13 | I Kade Astawa | 196906142008011020 | 38 JP | 190 |
| | Rata-rata | | | 149,2 |

- c) Sekretaris ditugaskan dalam pemantauan keaktifan ASN meningkatkan kompetensi baik melalui tatap muka maupun daring.
- d) Rekapitulasi capaian JP oleh Funsgional Umum yang ditugaskan sebagai admin Satkerthi Tabanan menunjukkan belum semua pegawai aktif ASN meningkatkan

kompetensi baik mmelalui tatap muka maupun daring, terbukti masih ada pegawai yang kompetensinya 0% dari target minimal 20 JP setahun. Hasil pengawasan rata-rata 13 pegawai sudah 149,2% di sampai triwulan II untuk dievaluasi lebih lanjut dimana masih ada 3 pegwai di bawah 20 JP.

3.3 Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

Pemantauan kedisiplinan dan kompetensi pegawai di BPBD terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran diri probadi pegawai dan tanggungjawab berjenjang. Namun dari hasil pemantaun masih diketemukan kendala dan sudah dirumuskan rencana tindak lanjutnya seperti berikut ini.

| No | Kendala | Rencana Tindak Lanjut |
|----|---|---|
| 1 | Masih ada pegawai yang terlambat absen dan pulang sebelum waktunya | Rutin melakukan rapat bulanan agar semua pegawai tertib mengatur waktu agar tidak lambat absen masuk atau mendahului absen pulang |
| 2 | Aplikasi yang sering lambat di jam-jam akhir batas absensi di pagi hari | Sekretaris dan admin presensi online BPBD sudah berkoordiansi dengan admin di BKPSDM |
| 3 | Motivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi secara daring masih belum kuat | Pimpinan mendorong pejabat struktural dan fungsional umum aktif mencari informasi dan mengasah kemampuan agar kompetensi meningkat yang dibuktikan dengan minimal 20 JP setahun |

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan penagwasan disiplin dan kompetensi pegawai sesuai aturan yang berlaku.
- b. Rata-rata disiplin pegawai yang diukur melalui indikator absensi online untuk periode sampai Triwulan II belum mencapai 100% karena ada pegawai terlambat absen, ada pulang sebelum waktunya dan atau ada lupa absen.
- c. Rata-rata kompetensi pegawai yang dikukur melalui indiaktor capaian 20 JP dalam mengikuti diklat, bimtek, pelatihan, semianr, workshop dan lainnya sudah 149,2% namun amsiha da 3 pegawai masih rendah karena belum aktif meningkatkan kompetensi secara daring.

4.2 Saran

Dari uraian tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kepegawaian khususnya tertib administarsi absensi pegawai dan kompetensi pegawai, maka sangatlah diperlukan pembinaan berjenjang di tingkat pimpinan secara brkelanjutan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga pelayanan administrasi dan pelayanan publik oleh aparatur dapat terintegrasi dan memberikan kemanfaat untuk peningkatan IPM daerah sesuai tujuan organisasi.



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E,M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran

DATA PRESENSI ONLINE

Periode Januari sd Juni 2024

| Bulan | Tingkat kehadiran | Evaluasi | Keterangan |
|-----------|-------------------|---|--|
| I | 99,26 | TL : 3 orang PSW : 2 orang TK : 0 orang | TL : terlambat absen PSW : pulang sebelum waktunya TK : tanpa keterangan |
| II | 99,50 | TL : 2 orang PSW : 2 orang TK : 0 orang | TL : terlambat absen PSW : pulang sebelum waktunya TK : tanpa keterangan |
| III | 99,58 | TL : 2 orang PSW : 2 orang TK : 0 orang | TL : terlambat absen PSW : pulang sebelum waktunya TK : tanpa keterangan |
| IV | 99,96 | TL : 1 orang PSW : 0 orang TK : 0 orang | TL : terlambat absen PSW : pulang sebelum waktunya TK : tanpa keterangan |
| V | 99,58 | TL :2 orang PSW : 2 orang TK : 0 orang | TL : terlambat absen PSW : pulang sebelum waktunya TK : tanpa keterangan |
| VI | 99,42 | TL : 2 orang PSW : 0 orang TK : 0 orang | TL : terlambat absen PSW : pulang sebelum waktunya TK : tanpa keterangan |
| Rata-rata | 99,47 | | |

Sekretaris BPBD,



Agung Raka Bhakta Wirawan,S.Pi,MMA.
NIP. 19760608 200212 1 009

DATA KOMPETENSI ASN

Periode Januari sd Juni 2025

| No | Nama | NIP | Capaian Kompetensi | Kegiatan yang diikuti |
|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | I Nyoman Srinadha Giri, SE,MM | 197406242006041010 | 27 JP | 135 |
| 2 | Agung Raka Bhakta Wirawan, S.Pi,MMA | 197606082002121009 | 51 JP | 225 |
| 3 | Dewa Gede Antakesuma, SH | 197512032002121007 | 27 JP | 135 |
| 5 | I Gede Dharmayasa, SE | 197003291999031005 | 35 JP | 175 |
| 5 | I Putu Purnawan SE, M.Si | 198612252011011013 | 3 JP | 15 |
| 6 | I Putu Suryawan, SE | 197509212002121007 | 40 JP | 200 |
| 7 | Ni Nyoman Sukriastini, S.Sos | 197710152007012017 | 38 JP | 190 |
| 8 | Meithy Elizabeth Sundah, SE | 197105232006042005 | 18 JP | 90 |
| 9 | I Ketut Suadnyana, SH | 197205292007011014 | 54 JP | 270 |
| 10 | I Ketut Agus Saputra, SH | 197208052002121008 | 27 JP | 135 |
| 11 | Ni Made Suasti, SE | 196712312008012070 | 12 JP | 60 |
| 12 | Ni Ketut Buda, SH | 196909112007012022 | 24 JP | 120 |
| 13 | I Kade Astawa | 196906142008011020 | 38 JP | 190 |
| | Rata-rata | | | 149,2 |

Sekretaris BPBD,



Agung Raka Bhakta Wirawan,S.Pi,MMA.
NIP. 19760608 200212 1 009